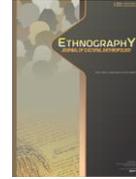




Ethnography

Journal of Cultural Anthropology

ISSN : 3031-1616 | DOI : 0.26887/ethnography.v3i14296
Available online at : <https://journal.isi-padangpanjang.ac.id/index.php/Ethno>



TRADISI POLITIK DARI ORDE BARU KE ERA REFORMASI

Yuslina¹, Windi Wiranda², Viona Anggia Putri³, Cantika Sefitriani⁴, Adil Rahmad Fajri⁵

Program Studi Antropologi Budaya Fakultas Seni Pertunjukan

Institut Seni Indonesia Padangpanjang, Jl Bahder Johan Padang Panjang Sumatera Barat

E-mail: ¹ yuslinast78.com, ² windiwiranda87@gmail.com, ³ vionaanggi454@gmail.com,

⁴ cantikasefitriani4@gmail.com, ⁵ adilrahmad234@gmail.com

Submitted:16-5-2024

Accepted:10-6-2024

Published:30-6-2024

A B S T R A K

Transisi politik dari Orde Baru menuju Era Reformasi di Indonesia menandai pergeseran signifikan dalam sistem pemerintahan negara, perilaku politik masyarakat, dan pemahaman terhadap ideologi nasional, Pancasila. Sejak tahun 1998, Indonesia telah mengalami perubahan besar yang dipicu oleh krisis multi-dimensi pada tahun-tahun terakhir Orde Baru, ditandai dengan meningkatnya ketimpangan sosial, korupsi yang meluas, dan tuntutan masyarakat untuk perubahan dan reformasi. Melalui empat kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, upaya dilakukan untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat, sementara Pancasila mengalami reinterpretasi sesuai dengan konteks zaman yang berubah. Studi ini menganalisis hubungan antara perilaku politik masyarakat dan ideologi nasional di Indonesia pasca-Orde Baru dengan mengkaji studi kasus transisi politik dan dinamika ideologi, menyoroti perubahan dalam partisipasi politik, pluralisme ideologi, peran media sosial, konflik ideologis, dan pengaruh globalisasi dalam membentuk pola perilaku politik masyarakat Indonesia.

Kata Kunci : *Transisi politik, Ideologi Nasional, Dinamika Ideologi.*

PENDAHULUAN

Transisi politik dari Orde Baru menuju era Reformasi di Indonesia menjadi tonggak sejarah penting bagi perubahan sistem pemerintahan, perilaku politik masyarakat, dan pemahaman terhadap ideologi bangsa, terutama Pancasila. Sejak awal tahun 1998, Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam lanskap politik, ekonomi, dan sosialnya. Krisis multi-dimensi pada masa akhir Orde Baru, yang ditandai dengan meningkatnya ketimpangan sosial, korupsi yang meluas, serta keinginan masyarakat akan perubahan dan reformasi, menjadi pemicu utama transisi politik ini.

Dengan mundurnya Soeharto dari jabatan presiden pada tahun 1998, Indonesia memasuki era Reformasi yang diharapkan

membawa perbaikan ekonomi, perubahan dalam sistem pemerintahan, dan peningkatan partisipasi politik masyarakat (Fikrotul Jadidah, 2020). Selama periode Reformasi, terjadi amendemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak empat kali, yang menandai upaya untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat. Pancasila sebagai ideologi bangsa juga mengalami pengulangan interpretasi dan pemahaman sesuai dengan konteks zaman yang berubah.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara perilaku politik masyarakat dan ideologi bangsa di Indonesia pasca-Orde Baru. Melalui studi kasus transisi politik dan dinamika ideologi, penelitian ini akan menyoroti perubahan-perubahan dalam partisipasi politik, pluralisme ideologi,

peran media sosial, konflik ideologis, dan pengaruh globalisasi dalam membentuk pola perilaku politik masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana ideologi dan perilaku politik saling memengaruhi dan berinteraksi dalam konteks perubahan politik dan sosial di Indonesia. Analisis ini menjadi penting untuk memahami dinamika politik dan sosial yang terjadi di Indonesia pasca-Orde Baru, serta implikasinya terhadap masa depan bangsa.

Selain itu, studi ini juga berkontribusi pada diskusi akademis tentang hubungan antara ideologi bangsa dan perilaku politik masyarakat dalam konteks transisi politik. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika ideologi dan politik di negara-negara yang mengalami perubahan sistem pemerintahan secara signifikan.

Melalui analisis mendalam terhadap kasus Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi para pembuat keputusan dan pemangku kepentingan terkait dalam upaya membangun sistem politik yang lebih stabil, inklusif, dan demokratis di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prilaku Politik

Transisi politik ini terjadi setelah adanya krisis politik dan ekonomi yang memburuk, serta meningkatnya ketimpangan sosial dan korupsi yang meluas. Kondisi ini memicu gerakan demokrasi yang menuntut perbaikan ekonomi dan reformasi total pada pemerintahan Indonesia. Era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, setelah pengunduran diri Soeharto sebagai presiden, membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pada masa ini, otonomi daerah diberikan lebih banyak kewenangan, dan partisipasi masyarakat dalam proses keputusan pemerintahan meningkat. Transisi politik ini juga memungkinkan adanya perubahan konstitusi

yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia Fikratul Jadidah, (2020).

Dalam pandangan Sudijono Sastroatmodjo, perilaku politik merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat terkait dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu kelompok masyarakat, kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Perilaku politik dapat dijelaskan sebagai hubungan antara pemerintah dengan publik, antar lembaga-lembaga pemerintah, dan diantara suatu kelompok dan individu dalam masyarakat terkait proses pembuatan, penerapan, serta penegakan dalam keputusan-keputusan politik yang menggambarkan perilaku politik. Secara universal perilaku politik bisa dimaksud sebagai hasil pemikiran ataupun tindakan manusia yang berkenaan dengan proses-proses pemerintahan.

Perilaku politik mencakup asumsi internal seperti pandangan, aktivitas, orientasi, serta keyakinan dan tindakan-tindakan nyata seperti memberikan suara, mengkritik, melobi, dan lain sebagainya. Persepsi politik berkaitan dengan cara pandang individu terhadap suatu objek tertentu, baik menyangkut penjelasan, informasi tentang suatu hal, maupun gambaran tentang objek atau situasi politik yang disampaikan dengan metode tertentu.. Sebaliknya, perilaku politik menggambarkan hubungan atau kaitan antara kepercayaan yang sudah melekat dan mendorong seseorang untuk merespons suatu objek atau kondisi politik dengan cara tertentu. Secara lebih rinci, persepsi politik mengacu pada cara individu memandang, memahami, dan menafsirkan realitas politik yang ada di sekitarnya. Ini melibatkan proses kognitif dalam memilih, mengorganisir, dan menginterpretasikan informasi politik yang diterima. Persepsi politik dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti latar belakang

budaya, pendidikan, pengalaman pribadi, dan pengaruh lingkungan sekitar. Di sisi lain, perilaku politik merujuk pada tindakan atau respon nyata yang ditunjukkan oleh individu atau kelompok dalam konteks politik. Ini dapat berupa partisipasi dalam pemilihan umum, bergabung dengan partai politik, mengikuti demonstrasi, atau terlibat dalam kegiatan advokasi dan lobi. Perilaku politik didasari oleh keyakinan, nilai, dan persepsi yang dimiliki oleh individu atau kelompok tersebut.

Amandemen terhadap Konstitusi Negara Indonesia, yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945, merupakan salah satu tuntutan utama dalam gerakan reformasi. Proses perbaikan ini akhirnya dapat diselesaikan melalui empat kali perubahan, yang menghasilkan dokumen resmi dengan nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perincian dari empat kali perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Pertama UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999, berhasil diamandemen sebanyak 9 pasal.
2. Perubahan Kedua UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 telah diamandemen sebanyak 25 Pasal.
3. Perubahan Ketiga UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 1999 berhasil diamandemen sebanyak 23 Pasal.
4. Perubahan Keempat UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002 ini telah berhasil diamendemen 13 pasal serta 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.

Ideologi Bangsa

Pancasila merupakan sekumpulan nilai-nilai yang dianggap benar oleh pemerintah dan rakyat Indonesia, serta digunakan sebagai pedoman dalam mengatur dan menata kehidupan bermasyarakat atau berwujud ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan milik

perseorangan atau golongan tertentu atau masyarakat tertentu saja, namun milik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Pancasila adalah hasil pemikiran dan nilai-nilai asli bangsa Indonesia yang lahir dari kemampuannya dalam menghadapi perkembangan zaman dan tantangan yang ada. Pembentukan ideologi ini mencerminkan cara berpikir bangsa Indonesia sekaligus membentuk arah bagi bangsa untuk mencapai cita-cita yang diinginkan.. Oleh sebab itu, ideologi bukanlah sebuah pengetahuan teoretis belaka tetapi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi sebuah keyakinan akan sebuah gagasan, (Anang Dony Irawan, 2023).

Sebagai ideologi bangsa yang menjadi pandangan hidup dan pegangan masyarakatnya, Pancasila harus bersifat universal dan mencakup seluruh nilai-nilai sosial dan budaya Indonesia, serta menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan bagi seluruh masyarakat.. Sebagai ideologi bangsa keberadaannya selalu di implementasikan ke dalam perilaku kehidupan dalam rangka berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Jika kita mengkaji sila-sila dalam Pancasila, sebenarnya sudah mencakup gambaran tentang karakter manusia Indonesia yang ideal, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para perumus ideologi tersebut.

Prilaku politik dan ideologi bangsa di Indonesia bisa ditinjau dari berbagai perspektif. Salah satu contoh studi kasusnya adalah transisi politik dari Orde Baru ke era Reformasi. Pada masa Orde Baru, ideologi yang dominan adalah Pancasila dengan penguasaan politik yang kuat dari satu partai, sedangkan pada era Reformasi, terjadi perubahan besar dengan munculnya demokrasi multipartai dan kebebasan berpendapat yang lebih besar. Dalam konteks ini, terdapat perubahan signifikan dalam prilaku politik masyarakat, seperti meningkatnya partisipasi politik melalui pemilihan umum, munculnya gerakan-gerakan sosial dan politik baru, serta pergeseran nilai-nilai politik yang dijunjung. Ini menggambarkan bagaimana ideologi dan prilaku politik masyarakat saling berinteraksi

dan berevolusi seiring waktu di Indonesia. Lanjutan dari studi kasus tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yang relevan:

- **Partisipasi Politik:** Setelah era Reformasi, terjadi peningkatan partisipasi politik dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk pemuda dan perempuan. Mereka aktif dalam berbagai gerakan politik, baik dalam partai politik maupun gerakan sosial.
- **Pluralisme Ideologi:** Seiring dengan berkembangnya demokrasi, terjadi pula pluralisme ideologi di Indonesia. Berbagai ideologi politik dan pandangan yang beragam dapat diungkapkan dan diwakili dalam wadah-wadah politik yang ada.
- **Peran Media Sosial:** Media sosial memiliki peran yang signifikan dalam membentuk opini publik dan memengaruhi perilaku politik masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai gerakan politik dan sosial yang viral melalui platform-platform media sosial.
- **Konflik Ideologis:** Meskipun terdapat keragaman ideologi, namun juga terjadi konflik ideologis antara berbagai kelompok masyarakat. Hal ini bisa tercermin dalam persaingan politik antarpolitical, pertentangan antarideologi dalam isu-isu tertentu, atau konflik antara kelompok agama atau etnis yang diwarnai oleh perbedaan ideologi.
- **Pengaruh Globalisasi:** Globalisasi juga memberikan dampak terhadap ideologi dan perilaku politik di Indonesia. Pengaruh ideologi dan nilai-nilai politik dari luar negeri dapat masuk dan berpengaruh dalam dinamika politik di dalam negeri. Melalui studi kasus ini, dapat dianalisis lebih lanjut bagaimana interaksi antara ideologi dan perilaku politik masyarakat di Indonesia, serta bagaimana dinamika ini terus berubah seiring dengan perkembangan zaman dan situasi politik global.

KESIMPULAN

Transisi politik dari Orde Baru menuju era Reformasi di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan, perilaku politik masyarakat, dan pemahaman terhadap ideologi bangsa, terutama Pancasila. Krisis multi-dimensi yang melanda Indonesia pada masa akhir Orde Baru menjadi pemicu utama terjadinya transisi politik ini. Melalui proses amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak empat kali, sistem pemerintahan Indonesia berusaha diperbaiki untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat yang menginginkan perubahan dan reformasi.

Perilaku politik masyarakat Indonesia juga mengalami transformasi yang cukup besar selama periode Reformasi. Partisipasi politik meningkat, ditandai dengan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum, gerakan sosial, dan aktivitas politik lainnya. Pluralisme ideologi semakin berkembang, di mana berbagai ideologi dan pandangan politik dapat diungkapkan dengan lebih bebas. Namun, di sisi lain, konflik ideologis juga terjadi antara kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan ideologi. Peran media sosial juga semakin signifikan dalam membentuk opini publik dan memengaruhi perilaku politik masyarakat.

Sementara itu, Pancasila sebagai ideologi bangsa mengalami pengulangan interpretasi dan pemahaman sesuai dengan konteks zaman yang berubah. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila harus bersifat universal dan mencakup seluruh nilai-nilai sosial dan budaya Indonesia, serta menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan bagi seluruh masyarakat. Studi ini memberikan wawasan

berharga tentang bagaimana ideologi dan perilaku politik saling memengaruhi dan berinteraksi dalam konteks perubahan politik dan sosial di Indonesia, serta bagaimana dinamika ini terus berevolusi seiring dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Anang Dony Irawan, (2023). Pancasila Sebagai Ideologi Yang Khas Dan Identitas Bangsa Indonesia.

Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 368780.

Fikrotul Jadidah, (2020). Transisi Politik Orde Baru ke Era Reformasi.

Gabriel Almond, (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*.

Jadidah, F. (2020). Perubahan Konstitusi Dalam Transisi Orde Baru Menuju Reformasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(1).

Philippe Nonet dan Philip Selznick diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusamedia, 2013.

Ramlan Surbakti, (1992). *Perilaku Politik. Memahami Ilmu Politik*.